

## **Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Bagian Umum Kantor Walikota Medan**

**Zukhruf Fahri<sup>1</sup>, Juliana Nasution<sup>2</sup>**

*1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Zukhruf Fahri

**E-mail:** fahrizukhruf@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Kantor Walikota Medan terkhusus di sub bagian umum keuangan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Peneliti mendapatkan hasil penelitian yakni penerapan sistem informasi akuntansi di Bagian Umum Kantor Walikota Medan yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang sudah terlaksana namun masih ada beberapa kendala atau hambatan dalam penerapannya. Adapun kendala atau hambatan yang ditemukan peneliti yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sedikit handal dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA Keuangan, belum terintegrasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) secara online, dan tidak adanya Surat Keputusan (SK) Walikota Medan untuk pembentukan Tim Pengelola SIMDA Keuangan. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SIA berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sudah berjalan namun ada beberapa kendala ataupun hambatan yang harus diperbaiki agar penerapan SIMDA Keuangan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

**Kata kunci:** *Sistem, Sistem Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen Daerah, Teori Implementasi Kebijakan*

### **Abstract**

*The purpose of this research is to know and understand how the implementation of Accounting Information Systems in the Office of the Mayor of Medan, especially in the sub-section public finance. This research belongs to the category of descriptive research by using the method of qualitative approach. Researchers get the result of the research is the application of accounting information system in the General Section of the Office of the Mayor of Medan, i.e. using the Regional Management Information System (SIMDA) Financial've done but there are still some obstacles or barriers in its application. As for the obstacles or barriers that researchers found that Human Resources (HR), which is still little reliable in the operation of the application SIMDA Keuangan, yet integrated with the rest of the Work Unit of the Village (on education) online, and the absence of a Letter of decree (SK) Mayor of Medan for the formation of the Management Team SIMDA. From the research results it can be concluded that the application of the WASTE in the form of the Regional Management Information System (SIMDA) Finance is already running but there are some obstacles or barriers that must be fixed to the implementation of SIMDA can run optimally and as expected.*

**Keywords:** *System, Information System, Accounting Information Systems Management Information Systems Of The Region, The Theory Of Policy Implementation*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh seluruh perusahaan maupun instansi pemerintahan. Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan perusahaan maupun instansi pemerintahan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah berkesinambungan sebagai pondasi agar dapat menghasilkan sistem pelaporan keuangan yang baik.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, tanggung jawab, dan wewenang yang dimilikinya. Sistem informasi akuntansi melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 tentang Pemerintahan Daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mewajibkan Pemda untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Saat ini Bagian Umum Kantor Walikota Medan telah menerapkan sistem informasi akuntansi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pada tahun 2015. SIMDA merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Aplikasi SIMDA keuangan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini juga banyak digunakan oleh banyak Pemerintah Daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Aplikasi SIMDA keuangan telah diterapkan oleh Bagian Umum Kantor Walikota Medan sebagai sistem informasi pengelolaan dan pelaporan keuangan dan barang milik daerah. Dalam penerapannya, ada beberapa kendala dan hambatan yang perlu dibenahi agar SIMDA keuangan dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kendala atau hambatannya yaitu sumber daya manusia yang masih sedikit handal dalam menggunakan aplikasi tersebut, belum terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online, dan tidak adanya surat keputusan Walikota Medan untuk struktur tim pengelola SIMDA keuangan di Bagian Umum Kantor Walikota Medan. Faktor-faktor tersebut harus dibenahi agar penerapan SIMDA keuangan dapat berjalan secara optimal serta dapat meningkatkan kualitas penerapan SIMDA keuangan terhadap pelaporan keuangan.

Adapun hasil penelitian dari Yogi Hertanto, dkk yaitu SIMDA Keuangan yang telah dilakukan bahwa SIMDA Keuangan sebagai suatu Sistem Informasi Manajemen mendukung tiga

hal utama, pada proses perencanaan, pengendalian serta pengambilan. Secara garis besar SIMDA Keuangan memberikan kontribusi terhadap ketiga proses tersebut yang kemudian berdampak pada tercapainya tujuan suatu organisasi, dalam penelitian ini yaitu berkontribusi terhadap proses pengelolaan keuangan terutama pada proses pelaporan keuangan, hal ini dapat dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan Ulum (2012) bahwa efektifitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Hal paling penting yang perlu dicatat yaitu bahwa efektifitas tidak hanya menyatakan tentang berapa besar biaya yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas hanya memandang bagaimana program dan kegiatan tersebut sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi di Bagian Umum Kantor Walikota Medan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Sistem Informasi**

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam artian yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Sistem informasi menurut Leitch dan Davis dalam minarni adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan bagi pihak luar tertentu berupa laporan- laporan yang diperlukan.

### **B. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Menurut Ardana dan Hendro Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan dan data non keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi Akuntansi juga merupakan sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### **C. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi Pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Adapun manfaat dari penerapan SIMDA yaitu sebagai berikut:

1. Data base terpadu, tidak perlu input berulang ulang untuk data yang sama.
2. Validasi data terjamin, data yang masuk akan tersinkron secara otomatis
3. Dapat menghasilkan output fomulir-fomulir sebagai berikut :
  - a) Anggaran : RKA, DPA, RAPBD, APBD, dan Perubahannya
  - b) Perbendaharaan seperti : SPM,register-register
  - c) Pembukuan : Jurnal, Buku beasr, Sub Buku besar
  - d) Laporan keuangan : Neraca, LRA, LAK
  - e) Laporan Intern : Harian, Mingguan, Triwulan

- f) Pengelolaan BM/KD : KIR, KIB, Buku investasi dan laporan mutasi barang.
- g) Fleksibel dapat menghasilkan informasi sesuai kebutuhan

Komponen-komponen Sisten informasi manajemen daerah Komponen- komponen SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP 2008),Yaitu sebgai berikut:

1. Akses jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan public.
2. Portal pelayanan public, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan public tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi

#### **D. Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*resources*), Sikap (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*). Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Citta Nadya, terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni: Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, hubungan antar organisasi. Keempat, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kelima, kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan. Keenam, Disposisi implementor.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

**Penelitian Nugraha (2013)**, dengan judul analisis implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (studi kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara), menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah telah mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan berjalan dengan baik dan aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik dari sebelumnya.

Penelitian Juddy Julian Pilat, Jullie J. Sondakh, Hendrik Manossoh (2016), dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Manado, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa ada beberapa faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado dalam penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi

keuangan daerah dapat membantu tugas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Manado dan dalam pengolahan data keuangan pada Pemerintah Kota Manado, SIMDA Keuangan telah didukung dengan pengendalian internal yang cukup memadai.

Penelitian Mitami (2013), dengan judul analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan pada pemerintah daerah kabupaten pangkep, menggunakan metode deskriptif fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai DPKAD Pangkep sudah memahami input dan output datanya. Faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang penerapan SIMDA keuangan yaitu integritas, profesionalisme, komitmen, sinergi serta kesempurnaan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan atau gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan peneliti. Menurut Bogdan dan Tylor dalam buku Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah hasil dari sumber kata-kata tertulis yang menciptakan data deskriptif dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara kepada salah satu informan kunci pada bagian umum di Kantor Walikota Medan serta dokumen/arsip SKPD berupa gambaran umum, struktur organisasi dan *job description*. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci yaitu Plt. Kasubbag Penatausahaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*interview*), pengamatan/observasi (*observation*), dan dokumentasi (*documentation*). Adapun langkah – langkah analisis data yang akan dikembangkan pada

- a. Data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian;
- b. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya;
- c. Mencari keterkaitan antar tema;
- d. Interpretasi atas temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan beberapa teori yang relevan;
- e. Hasil interpretasi dikembangkan secara deskriptif analisis kontekstual.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti, untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Umum Kantor Walikota Medan”. Adapun

analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut: **Sumber daya manusia yang masih sedikit handal dalam menggunakan aplikasi tersebut**

Penerapan SIMDA keuangan di Bagian Umum Kantor Walikota Medan tidak lepas dari faktor pendukung, ada beberapa faktor pendukung yang belum terpenuhi salah satunya adalah sumber daya manusia yang masih kurang handal dalam menggunakan aplikasi SIMDA keuangan. Masih terdapat beberapa sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan bidangnya, seperti ada pegawai yang sarjana hukum, sarjana pendidikan, bahkan sarjana teknik yang ditugaskan dalam menggunakan aplikasi SIMDA keuangan. Hal inilah yang menyebabkan beberapa sumber daya manusia masih kurang handal dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Penerapan SIMDA keuangan di Bagian Umum Pemerintah Kota Medan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memang handal baik dalam Edward III bahwa komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan serta cukup untuk menerapkan kebijakan. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (BimTek) yang teratur dan rutin serta didukung oleh hardware dan software yang memadai. Selain itu juga, perlu ditingkatkan kemampuan (*skill*) sumber daya manusia melalui bimbingan teknis yang rutin agar penerapan SIMDA keuangan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.

#### **Belum terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online**

Dalam pelaksanaannya juga terdapat faktor yang secara mendasar menghambat kelancaran pelaksanaan SIMDA Keuangan yaitu belum terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online, sehingga pemindahan data-data keuangan masih dilakukan dengan cara manual.

Penerapan SIMDA keuangan di Bagian Umum Kantor Walikota Medan harus terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online agar memudahkan pengguna dalam pemindahan data-data keuangan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ardana dan Hendro, Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan dan data non keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan maka perlu adanya integrasi dengan seluruh SKPD secara online, agar laporan yang dihasilkan lebih valid dan berkualitas. **Tidak adanya surat keputusan Walikota Medan untuk struktur tim pengelola SIMDA keuangan di Bagian Umum Kantor Walikota Medan**

Faktor yang terakhir yang belum terpenuhi adalah struktur tim pengelolaan SIMDA keuangan. Penerapan SIMDA keuangan dilihat dari struktur pengelolaannya masih belum tertib dilakukan karena belum ada Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola SIMDA di Bagian Umum Kantor Walikota Medan. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Satgas Pengembangan SIMDA Keuangan (BPKP) dalam hal sumber daya manusia untuk penerapan SIMDA Keuangan.

SK Walikota mengenai Tim Pengelola SIMDA keuangan sangat diperlukan. Hal ini sesuai yang disyaratkan oleh Satgas Pengembangan SIMDA Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Maka untuk itu, Bagian Umum Kantor Walikota Medan harus mengatur dengan jelas dan menetapkan SK Walikota untuk Tim Pengelola SIMDA keuangan



dengan struktur Satgas pengembangan SIMDA Keuangan BPKP yang terdiri dari: penanggung jawab, pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim; *administrator database, asisten administrator* dan timnya serta seluruh operator SKPD.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah penerapan sistem informasi akuntansi di Bagian Umum Kantor Walikota Medan menggunakan aplikasi SIMDA keuangan. Dalam penerapannya ada beberapa kendala ataupun hambatan yang belum terpenuhi seperti Sumber daya Manusia (SDM) yang masih kurang handal dalam menggunakan aplikasi SIMDA, belum terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online, dan tidak adanya SK tentang Tim Pengelola SIMDA keuangan. Dimana kendala atau hambatan tersebut dapat membantu mengoptimalkan penerapan SIMDA Keuangan di Bagian Umum Kantor Walikota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Hendro. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Mitra Wacana Media. Azhar, Susanto. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya. Darmawan, Deni. (2012). *Pendidikan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Rosda
- Edwards, G.C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional, Quartely Press.
- Hertanto, Yogi. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektifitas Pelaporan Keuangan. Dalam Jurnal Administrasi Publik. Malang. Vol.1 No.2 <https://pemkomedan.go.id/>
- Minarni, dkk. (2011). *Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada Politeknik Kesehatan Padang*. Dalam Jurnal Teknologi Informasi & Pendidikan ITP, 3(1). Nadya C. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado*. Dalam Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol.2 No.5.
- Ulum, Ihyaul. (2012). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Ed. 1, Cet 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Satgas Pengembangan SIMDA. (2008). *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.